

## Pencairan Dana Banpol Tunggu BPK

DEMAK- Hingga akhir Juni 2015, dana bantuan untuk partai politik (banpol) di Demak belum bisa dicairkan lantaran masih menunggu audit LPj 2014 dari BPK. Khusus pencairan dana banpol untuk Partai Golkar nantinya diputuskan oleh KPU setempat.

Kepala Kantor Kesbangpolinmas Demak, Taufik Rifa'i menyampaikan, LPj dari 12 partai yang menerima banpol 2014 baru masuk sekitar Maret lalu. Sesuai aturan dana banpol baru bisa dicairkan setelah parpol merealisasikan kegiatan, sehingga mereka harus menalangi terlebih dulu. Kesbangpolinmas sendiri, menolerir laporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan dana banpol diterima paling lambat satu bulan setelah tutup tahun anggaran.

"Setelah dinyatakan *clean* dan *clear* dari BPK maka dana banpol baru bisa dicairkan. Para partai politik sudah terbiasa dengan pencairan banpol di akhir tahun, sehingga mereka menalangi du-

lu," ujarnya.

Terkait dengan dana banpol Partai Golkar bilamana laporan hasil pemeriksaan dari BPK sudah turun, menurutnya, belum bisa serta merta dicairkan. Pihaknya akan berkonsultasi dengan KPU setempat. Hal itu terkait mekanisme pencairan dana banpol harus sepengetahuan ketua dan sekretaris partai. Sedangkan Ketua DPD II Partai Golkar Budi Achmadi saat ini tengah tersandung persoalan hukum.

Taufik menambahkan guna mencegah penyalahgunaan dana banpol, mulai tahun ini Inspektorat dilibatkan. Sesuai Permendagri No 77/2015, Inspektorat berlaku sebagai verifikator terhadap kelengkapan administrasi pengajuan pencairan banpol. Hanya saja verifikasi ini sebatas fiktif tidaknya pengurus maupun sekretariat partai, apakah terlibat sengketa atau tidak dan benar tidaknya perolehan suara yang dilaporkan partai bersangkutan.

Tahun ini alokasi dana banpol yang dialokasikan untuk sembi-

lan parpol peraih kursi di DPRD senilai Rp 1.087.509.000. Alokasi dana banpol ini mengalami kenaikan dari sebelumnya senilai Rp 967.208.000.

Sesuai urutan perolehan suara terbanyak, PKB menerima alokasi dana banpol tertinggi, yakni sebesar Rp 215.600.000. Disusul Gerindra dan Partai Golkar masing-masing sebesar Rp 185.290.000 dan Rp 180.100.000.

Lalu urutan selanjutnya PDIP dan PPP masing-masing sebesar Rp 161.194.000 dan Rp 100.128.000. Selanjutnya PKS dan Nasdem) masing-masing sebesar Rp 74.106.000 dan Rp 68.330.000. Sedangkan dua partai pada urutan terendah yakni Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan alokasi dana banpol masing-masing sebesar Rp 59.544.000 dan Rp 43.217.000. "Komposisi penggunaan dana banpol ini 60 persen untuk pendidikan politik dan 40 persen untuk kegiatan kesekretariatan partai," terangnya. ■

**SMNetwork/J9/SR**